

Kontestasi Penyiaran Agama di Ruang Publik: Relasi Kristen dan Islam di Kota Jayapura

Zuly Qodir

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Email: zuly_qodir@yahoo.com

Naskah diterima redaksi tanggal 12 Februari 2015, diseleksi 7 April 2015
dan direvisi 15 April 2015

Abstract

In Indonesia religious contestation emerges in interreligious groups. It occurs in Jayapura. Some people claim that indigenous people of Papua that are christians called mountain people but Muslims that live in beach or on land are not native people of Papua. The contestation happens in public spaces such as public field, mountain, street, and religious practices by exerting a mass of people to have Christian revival worship and conduct Tablighi Akbar for muslims. Both muslims and christians invite the speakers from outside Papua to attract others. Contestation occurs since 1998 until now. It can be seen from large demonstration and a ban of religious practices and the establishment of Islamic schools. Many problems that come from internal and external of adherent are found in Papua. The data collection consists of direct observation, interviews, literature reviews, and relevant document. The data employs interpretative approach conducted by Clifford Geertz in sociology and anthropology or the other social science in general.

Keywords: Religious Freedom, Contestation, Jayapura

Abstrak

Di Indonesia kontestasi ruang publik semakin nyata antar umat beragama. Di antaranya terjadi kontestasi di Kota Jayapura antara penganut agama orang asli Papua yang mengklaim penganut Kristen, dikenal dengan sebutan *orang gunung* versus orang yang beragama Islam, dikenal sebagai *orang pantai* dan *daratan*, dianggap sebagai bukan orang asli Papua. di Kota Jayapura. Kontestasi yang terjadi dengan hebat di ruang-ruang publik seperti lapangan, gunung, jalan dan berbagai kegiatan keagamaan yang mengerahkan massa seperti Kebaktian Kebangkitan Rohani di kalangan Kristen, serta tabligh akbar di kalangan umat Islam di mana keduanya mendatangkan para pembicara atau narasumber dari luar Papua sebagai daya tarik. Kontestasi tersebut telah berlangsung sejak tahun 1998 sampai sekarang, bahkan adakalanya muncul demonstrasi secara besar-besaran, dan pelarangan penyelenggaraan kegiatan keagamaan serta pendirian sekolah Islam. Pada masyarakat Jayapura terdapat banyak masalah dalam kehidupan beragama, baik internal maupun eksternal. Untuk mendapatkan data seperti itu dilakukan pengamatan lapangan dengan observasi langsung, wawancara mendalam dengan berbagai informan kunci, kajian kepustakaan dan dokumen-dokumen tertulis yang relevan. Data diolah dengan mempergunakan pendekatan interpretatif sebagaimana dilakukan Clifford Geertz dalam tradisi sosiologi-antropologi atau pun ilmu-ilmu sosial pada umumnya.

Kata kunci: Kebebasan Beragama, Kontestasi Publik, Kota Jayapura

Pendahuluan

Laporan tahunan kebebasan beragama dan berkeyakinan *The Wahid Institute 2013* menyatakan bahwa selama Januari sampai Desember 2013, pelanggaran atau intoleransi keyakinan beragama berjumlah 245 peristiwa. Terdiri dari 106 peristiwa (43%) yang melibatkan aktor negara dan 139 peristiwa (57%) oleh aktor non-negara. Sementara total jumlah tindakan kekerasan dan intoleransi mencapai 280, di mana 121 tindakan (43%) dilakukan aktor negara dan 159 tindakan (57%) oleh aktor non-negara (The Wahid Institute, 2014).

Fakta lapangan tersebut memunculkan pertanyaan perihal penyebab muncul dan terus berlangsungnya perilaku kekerasan dan tindakan pelanggaran Undang-Undang Dasar 1945 mengenai kebebasan beragama? Bahkan dalam kurun lima tahun terakhir, kekerasan antar umat beragama seperti dilaporkan oleh Setara Institute Jakarta mengalami peningkatan dari tahun 2010 sampai 2014 yaitu 5,7 % setiap tahunnya khususnya terkait dengan kekerasan atas kebebasan berkeyakinan dan beragama.

Kasus kekerasan antar umat beragama baik yang bersifat simbolik maupun aktual sering terjadi di Kota Jayapura. Menurut Muridan S Widjoyo (2012), di Kota Jayapura terjadi pelanggaran HAM, kekerasan militer dan kekerasan antar umat beragama. Dalam konteks yang sama, Idrus al-Hamid (2014) menyatakan bahwa di Kota Jayapura terjadi pula pengejaran pemeluk agama dan pelarangan pendirian sekolah berbasis agama.

Dengan demikian, pertanyaan berikutnya adalah mengapa kontestasi publik yang berlabelkan agama selalu berlangsung menegangkan dan cenderung mengarah pada kekerasan fisik, seperti pembunuhan, perusakan

rumah dan perusakan fasilitas publik lainnya?

Mengacu pada uraian di atas, dapat dikatakan bahwa negara telah mengarah pada apa yang dinamakan "*failed state*" dalam melindungi warganya untuk berkeyakinan dan beribadah. Oleh karena itu, jika suatu ketika negara ini dinyatakan sebagai "negara gagal" terutama jika tidak melindungi kebebasan berkeyakinan dan melaksanakan ibadah kelompok minoritas, maka kondisi semacam ini menjadi fakta yang nyaris tidak terbantahkan bahkan dianggap sebagai bentuk pelanggaran (Qodir, 2014).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab tiga hal, yaitu: 1). Apakah yang menyebabkan terjadinya kontestasi agama di ruang publik di Kota Jayapura? 2). Bagaimana bentuk-bentuk kontestasi tersebut berlangsung? 3). Bagaimana dampaknya di ruang publik? Ketiga pertanyaan tersebut dijawab dengan menggunakan perspektif teoritik tentang kontestasi ruang publik seperti dikemukakan Jurgen Habermas serta konstruksi sosial Peter L Berger. Sedangkan tujuan tulisan ini adalah untuk melihat agama dan pluralitasnya yang saling berkontestasi di antara Kristen dan Islam sehingga membentuk segmentasi dan konstruksi masyarakat tersendiri dalam bingkai budaya lokal di Papua.

Pasca reformasi 1998, persoalan SARA di Kota Jayapura mulai membuat masyarakat gelisah dengan terjadinya berbagai macam persoalan seperti krisis kepercayaan terhadap agama dan tokoh masyarakat tertentu. Peraturan-peraturan pemerintah pusat pun ada yang dianggap tidak menguntungkan kelompok tertentu. Hal ini akan menjadi catatan dalam masyarakat sehingga apabila tidak dicari jalan keluarnya, kemungkinan akan terjadi sebuah situasi yang mengancam keharmonisan.

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih pemikiran kepada pemerintah pusat dan daerah mengenai metode mengatur dan memperlakukan masyarakat beragama agar keharmonisan terus dapat berkembang dan dipertahankan.

Berdasarkan teori “Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan” yang dikemukakan oleh Abdullah digunakan dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa komunitas tidak dapat dipahami lagi sebagai suatu entitas yang utuh akibat dari suatu proses diferensiasi yang terjadi dalam berbagai bentuk, yaitu: 1). proses pengaburan batas-batas komunitas yang disebabkan oleh migrasi masuk dan migrasi keluar yang terjadi pada berbagai komunitas; 2). mengaburnya batas-batas kebudayaan yang menyebabkan proses sosialisasi mengalami pergeseran; 3). kepatuhan yang melemah akibat hilangnya kepemimpinan lokal dalam suatu komunitas (Abdullah, 2005). Proses-proses kebudayaan inilah yang tidak dapat dihindari dan niscaya berpotensi konflik yang diawali dengan adanya ketegangan-ketegangan.

Teori tersebut merupakan kelanjutan dari teori fenomenologi yang lahir untuk melihat paradigma fakta sosial. Di antara derivasi pendekatan fenomenologi adalah teori konstruksi sosial yang digagas oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann (1990). Berger dan Luckmann melihat bahwa usaha untuk memahami konstruksi sosial dilakukan dengan mendefinisikan kenyataan dan pengetahuan. Kenyataan adalah suatu yang tersirat dalam pergaulan sosial yang diungkapkan secara sosial melalui komunikasi lewat bahasa, bekerjasama lewat bentuk-bentuk organisasi sosial dan sebagainya. Masyarakat merupakan kenyataan objektif dan sekaligus merupakan kenyataan subjektif.

Kenyataan objektif masyarakat ini dimaknai sebagai suatu kenyataan yang berada di luar diri manusia dan berhadapan dengannya. Sedangkan kenyataan subjektif individu adalah terkait dengan kenyataan individu berada di dalam masyarakat sebagai bagian yang tidak terpisahkan. Dengan kata lain, individu adalah pembentuk masyarakat dan masyarakat adalah pembentuk individu. Kenyataan tersebut bersifat ganda dan bukan tunggal, yaitu kenyataan objektif sebagai kenyataan yang ada di luar diri manusia dan kenyataan subjektif sebagai kenyataan yang ada di dalam diri manusia (Berger dan Luckmann, 1990: 66-225).

Oleh karena itu, tulisan ini hendak melihat bagaimana konstruksi religiusitas sosial dan individu Kota Jayapura terbentuk, di tengah kondisi kristalisasi ke arah primordialisme, tidak hanya etnik dan agama melainkan simbiosis etnik-agama. Fenomena ini juga menandai titik pergeseran nilai dan tatanan sosial dalam kajian mengenai nasionalisme. Padahal sejatinya masyarakat dalam multikulturalisme merupakan bagian dari kesatuan yang unik dan beragam (Nurkhoiron dalam Budiman, 2005: 31)

Paham primordialisme pada masyarakat yang mempunyai keanekaragaman adat istiadat dan budaya memang merupakan sebuah keniscayaan. Namun, di satu sisi, perkembangan nilai-nilai kebersamaan yang sering dipraktikkan oleh masyarakat pun terjadi seiring lahirnya paham-paham agama yang baru. Paham paham baru yang menguatkan pemahaman yang mengarah pada klaim kebenaran yang terus-menerus dikembangkan dan disebar. Di sisi lain, proses perkembangan keberagaman juga terus berkembang. Oleh karena itu, pendidikan agama sebagai hal yang sangat penting perlu diterapkan secara

baik melalui keluarga atau lembaga pendidikan formal untuk menghindari masalah yang dapat berakibat terjadinya konflik di masyarakat.

Selain itu, pendekatan teori ruang publik yang dikemukakan Jurgen Habermas dapat memperlihatkan bahwa dalam setiap arena publik selalu terjadi pertarungan (kontestasi) antar kelompok masyarakat. Di antara mereka saling mempengaruhi masyarakat untuk mendapatkan pengaruh dan memenangkan pertarungan. Oleh karena itu, hampir tidak ada arena publik yang tidak berhubungan dengan kontestasi, termasuk di dalamnya kontestasi yang muncul dari dimensi keagamaan. Kontestasi semacam ini pula yang terjadi di Kota Jayapura di mana jumlah penganut Kristen dan Islam hampir berimbang.

Kontestasi dipahami sebagai sebuah pertarungan yang dilakukan oleh sekurang-kurangnya dua pihak atau lebih dalam masalah yang sama, dikarenakan adanya kepentingan padahal subjek atau materinya sedikit atau terbatas. Habermas menyatakan bahwa kontestasi selalu terjadi dalam ruang publik, di mana banyak pihak berkeinginan memperebutkan ruang sehingga dapat mempengaruhi dan merebut pihak lain, sekalipun antara ruang publik dan privat sebenarnya merupakan suatu hal yang sangat sulit untuk dipisahkan. Hal ini disebabkan, jika publik itu bermakna "tanah" dan privat bermakna otoritas, maka antara tanah dan otoritas sekarang telah menjadi satu sehingga memunculkan apa yang dinamakan dominasi dan subordinasi (Jurgen Habermas dalam Santoso, 2007).

Metode Penelitian

Teknik pengumpulan data dalam kajian ini dilakukan melalui studi

kepustakaan dan pengumpulan data di lapangan yang menitikberatkan pada observasi partisipasi. Metode ini dianggap cukup baik untuk mengetahui pemahaman masyarakat mengenai kehidupan beragama masyarakat dengan melebur diri ke dalam aktivitas kehidupan masyarakat Kota Jayapura dan semaksimal mungkin merekam seluruh aktivitas hidup masyarakat khususnya yang berkaitan dengan tema penelitian. Observasi ini dilakukan di Kota Jayapura dengan memfokuskan pada lembaga-lembaga sosial-keagamaan seperti masjid dan gereja.

Selain kedua teknik tersebut, wawancara menjadi metode utama dalam pengumpulan data. Semua data dikumpulkan dengan cara wawancara langsung secara intensif dengan para informan. Informan terdiri dari pejabat berwenang di Kementerian Agama RI, pejabat Kementerian Agama Provinsi Papua dan Kota Jayapura, tokoh-tokoh lintas agama di Kota Jayapura, tokoh-tokoh agama yang terlibat aktif dalam FKUB seperti para pimpinan agama (imam, pendeta), para tokoh penggerak demonstrasi keberagamaan, para koordinator demonstran, beberapa orang demonstran, praktisi maupun akademisi. Wawancara dilakukan hampir di setiap waktu, sehingga informasi tentang kehidupan keberagamaan dapat diperoleh dengan lancar.

Penentuan informan dilakukan berdasarkan sistem *snow-balling*. Sebagai informan kunci, peneliti memilih tokoh agama karena memiliki pengetahuan dan pemahaman serta pengalaman mengenai dinamika hubungan Kristen-Islam di Papua. Dari tokoh tersebut, wawancara dilakukan terhadap tokoh-tokoh lain yang memiliki perspektif yang dalam mengenai persoalan yang diteliti. Wawancara juga dilakukan terhadap pemeluk kedua agama dengan mempertimbangkan

tingkat penerimaan terhadap kedua belah pihak. Semua data hasil wawancara dan pengamatan lapangan sehari-hari dicatat dengan cermat dan serinci mungkin serta dikumpulkan sehingga menjadi catatan lapangan atau *fieldnotes*.

Adapun studi kepustakaan digunakan untuk menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan teori dan fakta lapangan yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Metode ini juga digunakan untuk menelusuri konflik-konflik yang terjadi di Papua terkait dengan Kristen dan Islam sehingga tidak terjadi duplikasi dan plagiarisme dalam pengkajian tentang akar-akar konflik di Papua.

Untuk menjamin validitas data dan menghindari tercecernya data, digunakan alat perekam baik berupa *tape recorder* maupun *handycam* atau kamera digital untuk mengabadikan peristiwa-peristiwa yang erat kaitannya dengan kehidupan keberagamaan sepanjang informan atau masyarakat mengizinkannya. Selain itu, agar terhindar dari bias etnosentrisme dan dapat melukiskan suatu persoalan dan pandangan hidup, dalam bentuk *thick description* peneliti sangat memerhatikan perspektif *emik* dan perspektif *etik*. Perspektif *emik* merupakan pendeskripsian suatu fenomena berdasarkan dari sudut pandang orang-orang yang diteliti, sedangkan perspektif *etik* adalah jika mendeskripsikan suatu fenomena berdasarkan konsep-konsep yang dimiliki oleh seorang peneliti (Geertz, 1992; Geertz, 2002: 175-182).

Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini menitikberatkan pada pendekatan interpretif dan bukan merupakan sebuah ilmu eksperimental untuk mencari hukum, melainkan sebuah ilmu yang bersifat interpretif untuk mencari makna (*Ibid*, 1992: 5). Dengan demikian, diuraikan dan dijelaskan lebih jauh mengenai makna-makna yang dapat ditangkap dari fenomena aktivitas

demonstrasi keberagamaan di lapangan, baik berupa pemaknaan yang dilakukan oleh masyarakat maupun oleh para pembuat kebijakan.

Hasil dan Pembahasan

Sekilas Kota Jayapura

Jayapura, sebuah kota yang letaknya berbatasan dengan Distrik Arso Kabupaten Kerom di sebelah selatan. Sebelah timur berbatasan dengan Papua Nugini, sebelah barat berbatasan dengan Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura, dan di sebelah utara berbatasan dengan Laut Pasifik. Kota Jayapura saat ini terdiri atas 5 distrik, yaitu Muara Tami, Heram, Abepura, Jayapura Selatan, dan Jayapura Utara. Menurut data pemerintah kota, Distrik Muara Tami merupakan wilayah yang paling luas (626,7 km² atau 66,67%), Abepura (155,7 km² atau 16,56%), Heram (63,2 km² atau 6,72%), Jayapura Utara (51 km² atau 5,43%), dan Jayapura Selatan (43,3 km² atau 4,62%) (BPS, 2012).

Jumlah penduduk Kota Jayapura adalah 261.776 jiwa terdiri atas 139.523 laki-laki dan 122.253 perempuan. Penyebaran penduduk bertumpu di Distrik Abepura yakni sebesar 28,52 %, kemudian diikuti oleh Distrik Jayapura Selatan sebesar 25,56 %, Distrik Jayapura Utara 26,34 %, Distrik Heram 16,23 % sedangkan Distrik Muara Tami 4,34 %. Abepura merupakan distrik dengan urutan teratas yang memiliki jumlah penduduk terbanyak berjumlah 74.669 jiwa. Jayapura Selatan dan Jayapura Utara berada pada posisi dua dan tiga yaitu berjumlah 66.923 jiwa, dan 66.339 jiwa. Distrik Heram merupakan distrik termuda di Kota Jayapura dan penduduknya menempati urutan keempat, yakni sebanyak 42.489 jiwa. Distrik Muara Tami memiliki wilayah terluas yang berada pada wilayah pedesaan dengan jumlah penduduk sebanyak 11.356 jiwa (BPS Kota Jayapura, 2010). Namun demikian,

ini tidak berarti bahwa Jayapura secara demografis populasinya didominasi oleh pendatang.

Dari data BPS tahun 2008, ditemukan hal yang berbeda yakni penduduk Kota Jayapura masih didominasi oleh orang asli Papua. Total keseluruhan penduduk Kota Jayapura sebanyak 236.456; Papua sebanyak 101.464 jiwa, sedangkan non-Papua sebanyak 134.992 jiwa. Perbedaan jumlah penduduk pribumi dan non pribumi terjadi secara alami, migrasi, dan penciptaan lapangan kerja baru. Peningkatan pertumbuhan jumlah penduduk di Kota Jayapura yaitu sekitar 15-20 % (<http://nirangkliung.blogspot.com/2012/01/bps-jumlah-penduduk-pribumi-lebih.html>. 20 Maret 2013).

Mengenai jumlah penduduk berdasarkan agama, komposisi penduduk Kota Jayapura mengalami perkembangan dari tahun ke tahun, khususnya penganut Kristen, Katolik, dan Islam. Pada tahun 2000 misalnya, jumlah penganut Protestan sebesar 75.288, disusul penganut Islam sebesar 70.072, dan penganut Katolik sebesar 78.968 orang, Hindu sebanyak 583, Budha sebanyak 367, dan lainnya berjumlah 270 orang (BPS, 2000). Sementara itu, pada tahun 2010 atau sepuluh tahun kemudian mengalami penambahan yang cukup signifikan pada tiga agama. Penganut agama Protestan berjumlah 118.981 orang, disusul penganut Islam berjumlah 95.506, dan Katolik 45.109 orang, serta Buddha 1.845 orang dan Hindu 1.569 orang.

Terkait dengan munculnya konflik keberagaman di Kota Jayapura akhir-akhir ini dapat dilihat dari tiga proses konflik laten (Fisher, 2000; Burton, 1990) yaitu pemicu/pra konflik, konflik, dan pasca konflik. Untuk itu, penelitian ini akan dibagi menjadi tiga bahasan yang satu sama lain merupakan bara laten konflik keberagaman di Kota Jayapura. Proses konflik ini dapat dilihat secara

kronologis yaitu, *Pertama*, riak-riak konflik dari bertemunya agama baru versus agama adat. *Kedua*, gelombang kecil pembentukan identitas religius dari agama baru berujung pada konflik agama (Islam) versus agama (Kristen) dikarenakan pembiaran dan pembiasaan khutbah populer misionaris dan dakwah berisi kebencian. *Ketiga*, kedua proses konflik sebelumnya, sepertinya berkelindan dengan proses konflik yang bermuara pada isu pendatang versus orang asli di dalam geliat dinamika politik pasca reformasi hingga otonomi khusus yang juga mengusung isu HAM dan ketidakadilan di bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya serta tuntutan kemerdekaan.

Kontestasi Ruang Publik

Dalam hal jumlah komposisi pemeluk agama, Kristen merupakan agama yang paling banyak dianut oleh penduduk Kota Jayapura yaitu 118.981 jiwa. Islam menjadi agama kedua yang dianut dengan jumlah pengikut 95.506 jiwa, Katolik sebanyak 45.109 jiwa, Buddha sebanyak 1.845 jiwa, dan Hindu 1.569 jiwa (BPS Kota Jayapura, 2012: 74). Data ini dengan jelas memperlihatkan bahwa memang Kristen menjadi agama yang dipeluk oleh mayoritas masyarakat Papua. Melihat proporsi populasi keagamaan di Kota Jayapura yang dapat dipakai sebagai representasi Papua, dapat menjadi indikasi adanya kesadaran politik geografis orang Papua dan umat Kristen pada umumnya yang merasa terancam dengan pendatang dan Islam. Peneliti LIPI, Muridan S Widjojo (2009: 17) menjelaskan bahwa pada tahun 2011, komposisi pendatang telah lebih banyak dari orang asli Papua. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran khususnya di bagi kalangan orang asli Papua yang mayoritas beragama Kristen tentang adanya Islamisasi.

Data statistik Kota Jayapura pada tahun 2000, memberikan gambaran nyata pesatnya pertumbuhan penduduk di sana dan berkelindan dengan pemeluk agama. Jika fokus perhatian ditujukan pada komposisi penduduk berdasarkan agama dengan membandingkan Kristen dan Islam, dalam konteks Indonesia misalnya, diperoleh keterangan bahwa perkembangan jumlah tersebut dari tahun ke tahun mengalami perubahan. Berdasarkan sensus 2010, Islam merupakan agama yang paling banyak dianut oleh penduduk Indonesia dengan jumlah 207,2 juta jiwa (87,18%), kemudian Kristen sebanyak 16,5 juta jiwa (6,69%), Katolik sebanyak 6,9 juta jiwa (2,91 %), Hindu dianut oleh 4 juta jiwa (1,69%), Budha sebanyak 1,7 juta jiwa (0,72%), Khonghucu dianut oleh sekitar 0,11 juta jiwa (0,05%), dan penganut agama lainnya sebesar 0,13 %. Jumlah terbesar pemeluk Islam terdapat di Jawa (63,01%) dan terkecil di Papua dan Maluku (1,1%).

Sementara itu, jumlah penganut Kristenter besar terdapat di Sumatera Utara (28 %), kemudian di Papua (11,2 %). Penganut Katolik terbanyak terdapat di Bali dan Nusa Tenggara (37,3 %) (Indiyanto, 2013: 14-15). Jika dibandingkan dengan kondisi demografi berdasarkan agama pada tahun 2000, semua agama mengalami perubahan persentase (dari aspek jumlah/kuantitas semuanya naik). Islam misalnya, pada tahun 2000 dianut oleh 88,22 % penduduk; Kristen 5,87 %; Katolik 3,05 %, artinya persentase pemeluk Islam dan Katolik turun, sementara penganut Kristen mengalami kenaikan (Penduduk dan Kehidupan Agama di Indonesia, Agus Indiyanto, CRCS, 2013: 23). Jumlah dan persentase di atas sedikit berbeda jika dibandingkan dengan kajian lain misalnya yang dilakukan oleh Leo Suryadinata, dkk (2003: 101-127

Dalam konteks Jayapura, pemeluk Islam menduduki posisi terbesar kedua dengan jumlah 70.072 jiwa atau 45,05 % dari total penduduk yang berjumlah

155.548 jiwa. Posisi pertama masih diduduki pemeluk Kristen dengan jumlah 75.288 jiwa atau 48,40 %. Posisi ketiga adalah pemeluk Katolik sebesar 8.968 jiwa atau 5,77 %. Pemeluk Islam (Muslim) didominasi oleh pendatang dengan jumlah 121.837 jiwa dan penduduk Muslim asli sebanyak 4.958 jiwa. Sedangkan pemeluk Kristen dan Katolik dari penduduk asli sebesar 149.272 jiwa, pemeluk Kristen dan Katolik pendatang sebesar 62.996 jiwa (Indiyanto, 2010: 14-15). Komposisi penduduk berdasarkan agama ini tidak lepas dari adanya migrasi besar-besaran dari luar Kota Jayapura sehingga munculnya anggapan adanya Islamisasi dan Kristenisasi di Kota Jayapura dalam beberapa konteks menjadi sangat kompleks.

Dinamika kehidupan sosial keagamaan di Kota Jayapura mengalami pasang-surut khususnya pasca reformasi. Kondisi ini terjadi akibat banyaknya perubahan mendasar dalam kehidupan sosial masyarakat Jayapura. Ketika Reformasi, keberanian penduduk baik asli maupun pendatang tampak terlihat dalam berbagai praktik kehidupan seperti semakin bangkitnya ekonomi pendatang dan semakin menguatnya tuntutan penduduk asli yang mulai terpinggirkan. Ketegangan pun tidak terhindarkan di mana kecurigaan yang sebelumnya mulai memudar muncul kembali dalam benak penduduk asli mengenai penguasaan penduduk pendatang. Kecurigaan adanya ekspansi dan penguasaan penduduk pendatang semakin menguat di kalangan mereka, bahkan sampai pada klaim menguatnya kembali Islamisasi melalui sektor publik seperti penguasaan sentra-sentra ekonomi dan pendidikan.

Di Kota Jayapura sebenarnya banyak masyarakat yang masih menganut keyakinan lokal sebagai agama mereka. Mereka meyakini *local religious* sebagai sesuatu yang telah mendarah daging sebelum zaman kemerdekaan

bahkan sejak zaman kolonialisme Belanda dahulu. Namun karena terjadi misi dan zending yang dilakukan oleh kolonialisme Belanda maka mereka kemudian beragama sebagaimana agama yang kita anut sekarang. Bahkan sejak rezim orde baru berkuasa, dan semakin kuat kekuasaannya maka di mana pun berada masyarakat Indonesia hanya boleh menganut salah satu agama yaitu Kristen, Katolik, Islam, Hindu, Buddha. Agama lokal dianut sebagian besar penduduk Papua yang berada di gunung atau sering dikenal dengan sebutan *orang gunung*. Sementara orang Islam menganut agama orang laut atau disebut *orang bawah*.

Salib dan Gereja Rumahan

Salib kini menjadi *landmarks* yang menonjol di Kota Jayapura. Di beberapa sudut kota, simbol ini dapat dijumpai dalam berbagai ukuran dan variasi. Simbol-simbol seperti itu dapat terlihat dengan jelas di atas bukit, di tikungan jalan, di puncak sebuah pulau kecil di teluk Jayapura, bahkan gapura jalan kampung. Fenomena ini, bagi peneliti merupakan fenomena baru. berbeda dengan fenomena pondok natal yang telah lama ada dan menghiasi perayaan natal setiap tahun di Jayapura. Fenomena tersebut menurut beberapa informan muncul paska tahun 2000-an. Hal ini menarik untuk ditelusuri lebih jauh, khususnya mengenai kemunculan fenomena ini dan hubungannya dengan hubungan antara Kristen dengan agama-agama lain di Jayapura.

Selain simbol salib, di beberapa tempat Kota Jayapura kini juga dihiasi nama-namakh Kristen. Fenomena visual inipun, kini diperluas dengan menjadikan situs-situs zending seperti Pulau Metu Debi, yang telah dideklarasikan pada 10 Maret 2013 menjadi Situs Pekabaran Injil di Tanah Tabi dengan slogan "Tuhanlah yang memilih dan menetapkan Metu Debi

sebagai tempat dimulainya peradaban baru orang Tabi (<http://papuapost.com/2013/03/7225/>. 20 April 2013).

Kesadaran mengenai sejarah asal-muasal agama di Papua inipun sepertinya memberikan kesadaran baru bagi kaum Muslim yang ada di Papua untuk mengetahui sejarah keberadaan mereka di Papua. Maka muncullah buku-buku sejarah Islam Papua seperti karya Wanggai (2009) dan Athwa (2004) atau usaha yang dilakukan oleh panitia Masjid Jayapura sebagaimana telah dipaparkan pada bab sebelumnya. Penulisan sejarah ini bisa dilihat sebagai upaya rekonstruksi dan reproduksi mitos keabsahan suatu kelompok atas sesuatu, dalam hal ini orang Papua dan tanahnya.

Sejarah yang dikonstruksi dan direproduksi oleh gereja, di mana gereja digambarkan bersama dengan Papua yang dimiskinkan, dianiaya, dibelenggu dan bahkan dihilangkan hak dan martabat mereka sebagai pemilik asli Papua oleh pemerintah dan dibumbui sentimen anti Islamisasi (untuk tidak dikatakan anti Islam), telah mampu membuat identitas ke-Papua-an yang tunggal mulai nyata mewujud. Namun, usaha kaum Muslim dalam merekonstruksi kesejarahannya di Papua tidak bisa dibilang sia-sia atau bahkan membuat runyam situasi Papua. Berdirinya Majelis Muslim Papua (MMP) merupakan salah satu dampak signifikan dari respons kesadaran sejarah yang baru terhadap Islam dan ke-Papua-an.

Seorang tokoh Muslim pendatang keturunan Yaman, Thaha Muhammad al-Hamid mampu bersanding bahu-membahu berjuang demi perdamaian dan kemerdekaan Papua. Hasil utama lainnya adalah mulai tumbuhnya teologi pembebasan Islam yang kini diusung oleh generasi Muslim Papua. Ismail Asso, yang kini berjalan seiring dengan teologi pembebasan sebagaimana yang diusung oleh gereja-gereja Papua semenjak 1995.

Teologi Pembebasan tersebut merupakan sebuah paham tentang peranan agama dalam ruang lingkup lingkungan sosial. Suatu usaha kontekstualisasi ajaran-ajaran dan nilai keagamaan pada masalah kongkret di sekitarnya. Teologi Pembebasan adalah upaya berteologi secara kontekstual yang lahir sebagai respons terhadap situasi ekonomi dan politik yang dinilai menyengsarakan rakyat. Hal yang kini menjadi euforia wacana bagi gereja-gereja Papua dalam menyuarakan perdamaian dan kemerdekaan Papua. Lihat misalnya pada pernyataan poin ketiga "Delapan Poin Deklarasi Teologia Pimpinan Gereja Gereja di Tanah Papua": Gereja Papua mengakui dosa kami telah lama membisu terhadap unsur-unsur *demonic* (jahat) dan destruktif dari pembangunan terhadap Orang Asli Papua yang menurut pengamat Jakarta merupakan bentuk penjajahan internal dan perbudakan terselubung. Sehingga Gereja Papua telah keliru mengartikulasikan isi firman Tuhan, "pemerintah adalah wakil Allah di dunia yang harus dijunjung tinggi", membuat Gereja lumpuh dan tidak dapat memainkan peran kenabiannya (<http://voiceofkingmipapua.blogspot.com/2011/01/delapan-poin-deklarasi-teologia.html>. 23 Februari 2012).

Sementara itu, Katolik lebih menekankan bahwa garis keterlibatan gereja di Indonesia pada paham teologi pembebasan berdasarkan pada pandangan Romo Ismartono yaitu solidaritas sosial berpegang pada Instruksi Mengenai Kebebasan dan Pembebasan Kristiani yang dikeluarkan Tahta Tinggi Vatikan yang anti kekerasan. "Butir-butir instruksi itu berbeda dengan yang ada pada Teologi Pembebasan di Amerika Latin. Gereja lebih memilih jalan reformasi ketimbang revolusi, yang sering memakan korban dan akhirnya melahirkan rezim totaliter," (Gatra, Nomor 42 Tahun II, 31 Agustus 1996).

Menurut pengamatan peneliti, setelah tahun 2000-an, ramainya pendirian monumen (salib) di Jayapura (bahkan di seluruh kota Jayapura), disulut oleh kesadaran kembali mengenai arti penting Kekristenan sebagai identitas ke-Papua-an. Munculnya identitas ke-Papua-an yang Kristiani seperti ini sesungguhnya merupakan dampak ikutan dari euforia munculnya wacana Rancangan Peraturan Daerah Manokwari sebagai Kota Injil, sebagai imbalan atas wacana pembangunan Masjid Raya Manokwari dan Islamic Center sekitar September 2005 yang dicetuskan oleh salah seorang kandidat Wakil Gubernur untuk meraih simpati pemilih Muslim di Papua Barat. Mereka merasa menjadi Kristen jika dapat mendirikan gereja atau sekurangnya mendirikan salib sekalipun hanya di gunung-gunung dan jalan-jalan di Kota Jayapura dan tanah Papua pada umumnya. Semboyannya Papua adalah Tanah Tuhan.

Menurut laporan ICG (2008) pada tanggal 19 Oktober, pemimpin gereja, melalui Badan Kerjasama Antar Gereja Kabupaten Manokwari (BKAG), mengeluarkan sebuah pernyataan bersama "keprihatinan yang mendalam" atas pendirian pemerintah yang "diskriminatif dan tidak adil" terhadap perkembangan agama Kristen di Indonesia. Mereka mengutip 991 aksi penyerangan terhadap gereja-gereja di seluruh Indonesia sejak kemerdekaan Indonesia tahun 1949 hingga hari ini. Pola intimidasi terhadap Kristen dan penyerangan terhadap para pendeta dan gereja-gereja. Kerugian materiil yang dialami gereja-gereja dan sekolah-sekolah Kristen. Trauma yang diderita oleh warga Kristen di wilayah konflik seperti di Ambon dan Poso dan diskriminasi hukum lewat "SKB Dua Menteri". Kedatangan Injil pada tanggal 5 Februari 1855 di pulau Mansinam, tutur pernyataan bersama tersebut menjadi "tonggak sejarah dimulainya peradaban baru di

Tanah Papua, membuka sebuah “tabir gelap”, dan menanamkan keyakinan lewat pengorbanan dan kemartiran para misionaris. Gendrang kontestasi ini sangat jelas tampak di Tanah Papua yang selama ini merasa mendapatkan perlakuan diskriminatif dari pemerintah Indonesia.

Gereja dan Pengajian Rumahan

Secara singkat, dari laporan ICG (2008) diperoleh keterangan bahwa apa yang terjadi di Kota Jayapura dengan menjamurnya gereja-gereja rumahan merupakan pengaruh masuknya gereja-gereja kelompok Pantekosta dan Kharismatik yang disebut juga sebagai Pantekosta baru (neo-Pantekosta). Gereja-gereja dan kelompok ini dikenal kontroversial, bukan saja karena mereka mengklaim menarik Muslim pindah ke agama mereka, yang menyebabkan mereka berselisih dengan masyarakat Muslim, tetapi juga karena kadang-kadang mereka mendapat dukungan moral dan material dari pemerintah atau militer, sehingga menjauhkannya dari kelompok-kelompok gereja setempat. Tidak hanya Muslim, umat denominasi gereja lain juga terancam, dan ini pastinya mengancam finansial donasi gereja dari persepuluhan. Dalam hal doktrin dan praktik agama, gerakan Kharismatik dan Pantekosta hampir mirip, dan mereka mempraktikkan “sebuah kualitas cara ibadah ekspresif yang dinamis dan secara fisik demonstratif” dan karenanya kebaktian mereka yang berada di rumah-rumah kecil, kampung yang padat ini sering membuat bising tetangga.

Kecilnya gereja rumahan ini merupakan ciri khas aktivitas mereka yang cenderung untuk bertemu dalam sel-sel atau kelompok-kelompok sembahyang yang berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Sel-sel tersebut dipakai untuk merekrut anggota

baru, seperti halnya kelompok-kelompok Muslim radikal bergantung pada kelompok-kelompok pengajian kecil untuk mengidentifikasi anggota yang mungkin bisa direkrut. Ketika mencapai jumlah anggota yang cukup, mereka bisa mendirikan sebuah gereja atau kelompok pengajian tertentu. Faktor inilah yang menjadikan cepatnya gereja menjamur di kampung-kampung Jayapura. Sebagian besar Gereja Kharismatik menganggap diri mereka bersifat antar-denominasi. Jadi, mereka menginginkan organisasi yang lebih formil.

Gereja Kharismatik menekankan pada Roh Kudus dan Penyembuhan Ilahi. Mereka percaya Roh Kudus memasuki orang-orang setelah mereka dibaptis dan memberi karunia berbahasa lidah (*speaking in tongues*), di mana seseorang tiba-tiba mengeluarkan kata-kata yang asing atau bahasa yang belum pernah dipelajari. Ini merupakan salah satu metode mereka karena sifatnya yang apolitis dan mengajarkan “teologi sukses”, dengan menghubungkan keyakinan, kekayaan, dan kesuksesan. Orang yang beriman adalah orang yang kaya; kemiskinan, penyakit atau penderitaan adalah tanda kurang beriman. Seperti yang digambarkan oleh seorang pendeta, “kalau orang yang berdosa punya mobil Toyota, maka yang saleh pasti akan mendapat mobil BMW”. Doktrin ini menjadi populer di Papua karena sangat bertautan dengan agama Melanesia orang-orang Papua asli, yakni *cargo cult* “pemujaan barang”, yang menghubungkan kedatangan orang asing dengan harapan untuk mendapat akses ke barang-barang dan keselamatan spiritual. Sifatnya apolitis mirip, *salafi* yang juga agresif dan cenderung provokatif dalam ekspresi dakwahnya.

Isu dan janji mengenai adanya bantuan pada gereja oleh pemerintah daerah setelah kemenangan Gubernur Papua dan Walikota Jayapura,

sebagaimana disampaikan oleh informan peneliti (Satgas Papua dan anggota DPRP. 03 Juni 2013) sepertinya akan menjadi isu yang panas di internal gereja dalam hal pembagiannya. Terjadi kerumitan mengenai hal pembagian bantuan karena semakin menjamurnya gereja neo-Pantekosta dan Kharismatik ini. Perlu diketahui bahwa selama ini gereja Kristen lebih banyak tergantung pada donasi umatnya. Gereja Rumahan sebagai basis utama Kristen Kharismatik memantik menguatnya kontestasi dengan umat Islam seperti terjadi di Kota Jayapura.

TOA, Adzan dan Tabligh Akbar

Realitas lain menunjukkan bahwa memang benar alat pengeras suara (TOA) juga sudah lama dipakai oleh beberapa gereja di Jayapura, misalnya daerah Hamadi, seperti dikisahkan oleh tokoh Satgas Papua Hamadi dan Pemuda anggota DPRP saat berbincang pada 03 Juni 2013 yang juga diamini oleh Amirullah dan Idrus al-Hamid, kolega peneliti dari STAIN Jayapura yang menghabiskan waktunya di wilayah tersebut. Namun dari pengalaman hidup seorang informan yang telah puluhan tahun berdomisili di Jayapura terungkap bahwa sebelum tahun 2000 tidak ada gereja yang menggunakan corong pengeras suara (TOA) dan diarahkan keluar. Hal ini juga ditegaskan oleh sekretaris Sinode GKI di Tanah Papua. Menurutnya, awal munculnya rasa saling was-was antara pemeluk agama di Papua termasuk penggunaan fasilitas ibadah dimulai pada awal 90-an, di mana setiap agama melihat agama lain sebagai ancaman. Secara pribadi, ia mendapatkan banyak pertanyaan dari para jemaat yang meminta sikap terkait banyaknya gerakan-gerakan agresif Islam garis keras terhadap saudara-saudari Kristen mereka yang minoritas di daerah lain di Indonesia. Namun dengan pendekatan kasih, riak-riak tersebut masih dapat di

padamkan, walaupun ia menyimpan bara yang sewaktu-waktu pasti akan terbakar (FGD di Hotel Horison Jayapura, 19 November 2013

Isu tersebut kini tengah diusung kembali oleh KH Masdar Farid Masudi (Dewan Masjid Indonesia) dalam acara Tabligh Akbar bertema *Khawarij dan Dajjal Salafi, Wahabi-Amalan Sunnah yang dianggap Bid'ah* di Masjid al-Ikhlas Mekarsari, Bekasi Timur, tanggal 26 Mei 2013. Ia mengatakan, "apabila memang ada yang mau mendengarkan tausiyah atau pembacaan ayat suci al-Qur'an, maka sebaiknya orang itu datang ke masjid. Selain dapat mengusik ketenangan lingkungan sekitar atas suara ceramah itu, menurut Masdar, informasi yang disampaikan dalam ceramah atau khutbah Islam akan terlalu membuka rahasia dan aturan-aturan agama Islam. Kalau diperdengarkan, itu kan seperti kita ditelanjangi. Orang jadi tahu semua informasi baik dan buruk kita," demikian penuturannya (<http://www.tempo.com>, 27 Mei 2013; <http://www.tempo.co/read/news/2013/05/27/078483395/Dewan-Masjid-Ceramah-Tak-Boleh-Pakai-Toa>).

Di Jayapura, TOA masjid oleh sebagian umat Kristen dikatakan tidak toleran terutama ketika mengumandangkan adzan tiap waktu shalat tiba, tidak jarang dikumandangkan dengan keras, dan *tahrim* dilakukan dalam waktu yang lama sebelum adzan. Namun demikian, ketika ceramah hampir tidak ada masjid yang mengeluarkan isi tausiyahnya ke luar kompleks. Problem yang kemungkinan membuat gereja gerah terhadap kebisingan adalah kenyataan yang terjadi di luar Papua, terutama di Jawa di mana TOA masjid semakin merajai ruang audio dan hampir tidak jeda kecuali setelah subuh hingga zhuhur atau setelah magrib hingga subuh. Namun, ada kebiasaan kini sebelum adzan lima waktu, tidak hanya *tahrim* yang diperdengarkan dengan keras tetapi juga bacaan shalawat, dzikir, bacaan al-Qur'an yang merupakan

rekaman. Dengan suara keras, lantunan tersebut justru ditinggal pergi begitu saja oleh takmirnya. Suara anak-anak belajar mengaji dan khutbah (Jumat maupun lainnya) pun demikian, selalu mewarnai masjid ketika tiba waktunya. Jelas ini sangat mengganggu tidak hanya umat lain, tetapi juga umat Islam sendiri. Demikian itu pendapat sebagian tokoh Kristen di Kota Jayapura tentang adanya TOA dan adzan di masjid-masjid.

Sementara di kalangan Kristen menggelar Kebaktian Kebangunan Rohani (KKR), di lain pihak, umat Islam juga melakukan hal yang sama melalui kegiatan Tabligh Akbar dengan berbagai tema. Kegiatan seperti ini dilakukan hampir setiap bulan yang dimotori oleh organisasi-organisasi keagamaan di Jayapura. Tabligh Akbar dilakukan dengan pola yang hampir sama dengan KKR tadi. Panitia dengan berbagai upaya mendatangkan pembicara dari luar Papua. Biasanya mendatangkan penceramah dari Jawa. Umat Islam berdatangan ke tempat acara dengan menumpang angkutan yang juga disiapkan oleh panitia pelaksana. Pengerahan massa yang berskala besar sangat memungkinkan, mengingat berbagai fasilitas disiapkan oleh pelaksana. Tempat pelaksanaan kegiatan dilangsungkan di tempat-tempat umum seperti Lapangan Trikora, Lapangan Mandala, dan PTC Entrop, serta tempat-tempat umum lainnya. Ustadz Fadlan adalah salah satu ustadz yang paling populer di kalangan umat Islam Papua yang sering memberikan pengajian Tabligh Akbar. Ustadz Fadlan merupakan seorang asal Papua (Fakfak), di mana penduduknya yang menganut agama Islam hampir sama banyak dengan penganut Kristen.

KKR Kristen dan Tabligh Akbar Islam

Pasca reformasi, kegiatan keagamaan yang melibatkan banyak

massa terus menguat dan marak di tengah pasang-surut hubungan Kristen-Islam di Jayapura. Kegiatan Kebaktian Kebangunan Rohani (KKR) misalnya, selalu dilakukan setiap bulan. Agenda rutin ini menjadi ajang selain kebaktian juga diselingi dengan pengobatan gratis. Pemeluk Kristen berdatangan dari segala penjuru kota. Angkutan-angkutan disiapkan, spanduk memenuhi penjuru kota, pamflet, dan informasi melalui media massa. Kegiatan ini sangat dinantikan oleh mereka mengingat dilakukan secara terbuka di tempat umum dengan mendatangkan pembicara dari Jawa bahkan dari luar negeri.

Menurut informasi tokoh-tokoh Kristen dan Katolik di Kota Jayapura hingga kini belum ada uskup asal asli Papua, semua uskup di Jayapura berasal dari luar Papua. Hal ini juga menyiratkan adanya 'tekanan' atau dalam bahasa halusanya pengawasan ketat pemerintah. Kasus-kasus sikap gereja yang merasa terintimidasi oleh pemerintah juga dirasakan oleh kaum Muslim radikal. Radikalitas masyarakat apalagi yang berbasis keagamaan selalu dilihat sebagai gejala ancaman bagi penguasa/pemerintahan manapun. Situasi yang berkepanjangan ini menimbulkan sentimen penuh prasangka di benak gereja. Gereja-gereja harus beradaptasi dengan bekerja di bawah pemerintah Indonesia yang jelas memiliki simpati kepada Muslim berkenaan dengan bantuan keagamaan (Mujiburrahman, 2006). Sebanyak 80% dari bantuan keagamaan pemerintah tertuju kepada umat Islam meskipun mereka hanya minoritas di Papua. Namun, jumlah tersebut masih menjadi pertanyaan karena pada praktiknya Islam tidak mendapatkan sebanyak itu, bahkan kegiatan dan institusi pendidikan yang mereka selenggarakan lebih banyak diperoleh dari umat (Tokoh MUI Jayapura. Wawancara. 31 Mei 2013).

Program transmigrasi pemerintah memang menyebabkan masuknya muslim yang kemudian menduduki posisi senior dalam pemerintahan dan administrasi. Yonas S. Serpara, pendiri Laskar Kristus di Jayapura, sosok tokoh pejuang gerilya persiapan Pepera, yang pernah dituduh sebagai provokator kerusuhan Maluku, pelaksana Badan Pertanahan Nasional di Jayapura selama beberapa periode yang ditugaskan oleh mendagri saat itu Yogi SM menyatakan bahwa hal ini barangkali bukan karena kehendak murni pemerintahan pusat namun sepertinya ada permainan oknum di saat perekrutan di bawah, khususnya transmigran yang datang dari Jawa (Timur). Isu yang terjadi saat dia tiba di Jayapura adalah sebaliknya yakni isu Kristenisasi namun sebenarnya mereka adalah orang Nasrani yang membuat KTP Islam agar bisa ikut transmigrasi. Sejak peristiwa itu transmigran ke Papua banyak didatangkan oleh pemerintah dari daerah-daerah Kristen di Indonesia khususnya dari Indonesia Timur (Yonas Separa. Wawancara. 04 Juni 2013). Keterangan lain diperoleh dari paman peneliti untuk melihat sisi yang lain bahwa Kristenisasi itu memang ada benarnya. Bahkan ia terlibat langsung dalam peng-Islaman ulang kepada mereka yang telah di-Kristen-kan. (Wawancara. 05 Juni 2013).

Terkait dengan tekanan sebagaimana dimaksud di atas, ada juga pendekatan tangan besi dari tentara dan polisi – terhadap kegiatan oposisi apapun, bahkan kepada mereka yang tidak bersalah – terhadap aturan dan peraturan di Indonesia. Setiap perasaan identitas yang terpisah, seperti ‘ke-Papua-an’, akan diturunkan semangatnya atau bahkan dihukum. Tindakan semacam ini tidak hanya terjadi di Papua mengingat sebagai negeri yang berdaulat maka hukumnya adalah jelas terhadap upaya yang dianggap makar seperti GAM Aceh, RMS, dan DI/TII.

Melihat fenomena yang terjadi di Kota Jayapura terhadap terkait fenomena keagamaan yang terjadi akhir-akhir ini menunjukkan adanya korelasi antara reaksi Muslim di Jayapura dengan kondisi yang terjadi di luar, khususnya mengenai rencana pemberlakuan Perda Injili di Manokwari. Kalangan Muslim di Jayapura tidak diam menyikapi hal tersebut. Beberapa pertemuan tokoh Muslim disponsori oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Papua dilakukan untuk mempersiapkan strategi jika perda tersebut benar-benar disahkan. Hal ini memperlihatkan bahwa peran agama sangat signifikan karena selalu diposisikan sebagai penguat di kalangan pemeluknya. Uraian ini difokuskan pada persoalan bagaimana agama hadir menjadi satu dari pembentukan identitas ke-Papua-an. Hal ini didasarkan pada kondisi bahwa praksis kerukunan agama di Kota Jayapura berbeda dengan wacana perdamaian yang dinyatakan oleh elite agamawan.

Penutup

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: *Pertama*, realitas antara agama dan ruang publik (politik) dalam konteks Kota Jayapura tidak dapat dilepaskan satu dengan yang lainnya. Tanah dan otoritas menjadi sesuatu yang menyatu dalam dominasi dan subordinasi. Apa yang terjadi di kalangan umat beragama juga terjadi dalam politik. Dalam hal kehidupan sosial menunjukkan bahwa keduanya (agama dan politik) dalam praktik kehidupan sosial masyarakat menyatu. Agama menjadi sangat sakral, tetapi pada saat yang bersamaan sangat mudah dijual.

Kedua, budaya masyarakat permisif memberikan ruang bagi mereka untuk mengambil berbagai bentuk budaya yang datang dari luar. Penerimaan masyarakat

yang tinggi berakibat munculnya budaya baru, meniru segala sesuatu yang cocok kemudian mengakui sebagai miliknya. Klaim yang berlebihan ini pun berubah menjadi ajang menunjukkan pengaruh dan kekuatan sehingga menimbulkan ragam gesekan di kalangan masyarakat Jayapura. Hal ini diperparah oleh migrasi penduduk luar yang masuk ke Papua dengan budaya bawaan yang berbeda dengan budaya setempat.

Ketiga, perebutan ruang publik agama di Jayapura terjadi dalam berbagai bentuknya, dari yang bersifat simbolik hingga politik praktis seperti perebutan jabatan pemerintah daerah atau pejabat di daerah antara Kristen dan Islam. Ruang publik agama merupakan salah satu arena menghadirkan agama secara berani di masyarakat untuk menghadirkan paham keyakinannya di tengah masyarakat yang pluralistik. Ruang publik menjadi ajang pertarungan antar sesama agama Abraham di Kota Jayapura dengan kekuatan yang bisa dikatakan sama-sama hebat. *Keempat*, adanya pelarangan pembangunan tempat ibadah umat Kristen di Jawa, berlakunya Perda Syariah di beberapa wilayah Indonesia, seperti di Bulukumba, NAD, Sukabumi, Cirebon dan seterusnya berdampak pada adanya gagasan Perda Injili di Manokwari Papua.

Dari temuan penelitian dan pembahasan serta kesimpulan di atas, maka terdapat beberapa rekomendasi yaitu sebagai berikut: *Pertama*, kekhasan lokal yang dimiliki oleh masyarakat Jayapura hendaknya tidak harus menutup diri dari perkembangan yang datang dari

masyarakat luar, termasuk masyarakat asal Jawa di Jayapura. Peradaban masyarakat tidak akan berkembang dengan baik jika tidak bersedia berdialog dan berdialektika dengan pihak lain yang berbeda. Oleh sebab itu, *outward looking* merupakan hal yang tidak dapat dilupakan dan ditinggalkan. Melihat keluar tanpa harus melupakan kultur lokal yang dimiliki.

Kedua, pemerintah harus berhati-hati dalam menyelenggarakan kebijakan yang berhubungan dengan kehidupan umat beragama. Pendirian rumah ibadah merupakan persoalan yang masih terus berlangsung baik di Kota Jayapura maupun di kota lainnya di Papua. Hadirnya Perda-Perda Syariah di Jawa dan beberapa tempat di Indonesia menimbulkan reaksi dari kalangan umat Kristen di luar Jawa seperti di Kota Jayapura sebagai bentuk diskriminasi atas Kristen. Oleh sebab itu, rekomendasi secara khusus kepada Kementerian Agama Republik Indonesia, pemerintah harus memberikan pengawasan dan tindakan tegas atas pelanggaran-pelanggaran aturan yang diundangkan atau dikeluarkan tanpa memandang latar belakang agama. *Ketiga*, perguruan tinggi (dunia pendidikan) hendaknya bersedia memberikan pendidikan yang lebih inklusif, toleran, progresif dan pro-aktif kepada mahasiswa dan masyarakat untuk dapat merespon masalah-masalah yang muncul di lapangan. Karena pendidikan tidak dapat diselenggarakan tanpa mendasarkan dan mengembangkan pengetahuan tentang kearifan lokal.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Irwan, dkk. *Dialektika Teks Suci Agama Strukturasi Makna Agama dalam Kehidupan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Abdullah, Irwan. *Produksi dan Reproduksi Kebudayaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

- Andito. *Keberagamaan, Wacana Agama dalam Dialog Bebas Konflik*. Bandung: Pustaka Hidayah, 1998.
- Aritonang, Jan Sihar and Karel Steenbrink. *A History of Christianity in Indonesia-Studies in Christian Mission*. Leiden-Boston; Brill.
- Astrid, S. *Kebudayaan Jayawijaya dalam Pembangunan Bangsa*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.
- Athwa, Ali. *Islam atau Kristenkah Agama Orang Irian?* Jakarta: Pustaka Da'i, 2004.
- Azra, Azyumardi, "Kerusuhan-kerusuhan Masal yang Terjadi di Indonesia Baru Baru ini: Kemunduran Nasionalisme dan Kemunculan Separatism" *Konflik Komunal di Indonesia Saat Ini*. Leiden-Jakarta: INIS dan PBB, 2003.
- _____. "Merajut Kerukunan Hidup Beragama antara Cita dan Fakta," *Jurnal Harmoni: Jurnal Multikultural dan Multireligius, Vol II No. 7, Juli-September*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Beragama, Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI, 2003.
- Badan Kesatuan Bangsa Provinsi Papua. *Undang-Undang Republik Indonesia, No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua*. 2005.
- Berger, Peter L dan Thomas Luckmann. *Tafsir Sosial Atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan*. Jakarta: LP3ES, 1990.
- _____. *Langit Suci, Agama Sebagai Realitas Sosial - The Sacred Canopy*. Jakarta: LP3ES, 1991.
- Budiman, Hikmat. *Hak Minoritas Dilema Multikulturalisme di Indonesia*. Jakarta: Yayasan TIFA, 2007.
- Cholil, Suhadi, "Kata Pengantar." *Agama di Indonesia dalam Angka: Dinamika Demografis Berdasarkan Sensus Penduduk tahun 2000 dan 2010*. Agus Indiyanto (ed.). Yogyakarta: CRCS UGM, 2013.
- Geertz, Clifford. *Interpretif Sociology*. Oxford, 1992.
- _____. "Dari Sudut Pandang Pribumi: Hakikat Pemahaman Antropologis," *Tafsir Politik: Telaah Hermenutis Wacana Sosial-Politik Kontemporer*. Yogyakarta: Qalam, 2002.
- Habermas, Jurgen. *Ruang Publik: Sebuah Kajian tentang Katogori Masyarakat Borjuis*. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2007.
- Mujiburrahman. *Mengindonesiakan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Widjoyo, S. Muridan,(ed). *Papua Roadmap, Negotiating the Past, Improving the Present and Securing the Future*. Jakarta: LIPI, Tifa and Yayasan Obor Indonesia, 2009.